

## **STRATEGI COMMUNITY ENGAGEMENT DALAM PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) DI KOTA TASIKMALAYA**

**Endah Mustika Ramdani<sup>1</sup>, Lidia Maasir<sup>2</sup>, Rike Anggun Artisa<sup>3</sup>**

*Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : [endahmustika@gmail.com](mailto:endahmustika@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Program Gema Madani Simpati merupakan sebuah program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Keberhasilan program ini ikut ditentukan oleh sejauhmana masyarakat dapat terlibat untuk membangun daerahnya. Maka dari itu, mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Gema Madani Simpati didukung oleh tiga strategi dalam proses komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang bagi partisipasi aktif masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Community Engagement, Partisipasi, Pembangunan*

### **PENDAHULUAN**

Saat ini kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia masih menjadi masalah yang menyita perhatian besar. Kemiskinan dapat terjadi secara alami oleh akibat kelangkaan sumber daya, namun ada juga yang masuk pada kategori buatan sebagai akibat dari struktur sosial yang membuat masyarakat tidak bisa menguasai fasilitas ekonomi secara merata (Suyanto, 2011). Terkait dengan hal tersebut, pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan upaya-upaya mencapai kemajuan secara merata

demikian mengentaskan kemiskinan. Oleh itu, saat ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang difokuskan pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini sejatinya pemerintah didorong untuk tidak hanya sekedar memberikan berbagai fasilitas untuk masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat membuat masyarakat lebih berdaya. Maka dari itu, pembangunan seharusnya tidak dilepaskan dari unsur pemberdayaan

masyarakat itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu agar dapat kreatif membangun dirinya sendiri (Akbar dkk, 2018).

Sebagai proses untuk memberdayakan masyarakat, pembangunan perlu melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dilaksanakan ini merupakan sebuah upaya dalam pembangunan masyarakat (*community development*) (Zamhariri, 2008).

Pembangunan masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat bersatu untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah (Kemenkeu RI, 2014). Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan merupakan hal yang tepat.

Kesadaran akan perlunya melibatkan masyarakat ini juga didorong oleh munculnya kesadaran dari pemerintah daerah bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal daerahnya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diyakini lebih mengetahui permasalahan yang sedang dihadapinya. Maka dari itu,

sudah seharusnya masyarakat juga ikut mengidentifikasi solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Kota Tasikmalaya mengadopsi konsep pembangunan dengan pelibatan masyarakat melalui program yang disebut Gema Madani Simpati (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif). Program ini memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Data Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki angka kemiskinan sebesar 6,91% yang tentunya masih dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar untuk tingkat kemiskinan nasional. Selain itu, menurut data BPS (Maret, 2019), Kota Tasikmalaya menduduki urutan pertama sebagai kota termiskin di Provinsi Jawa Barat. Tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya Maret 2019 sebesar 11,60 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 76,98 ribu jiwa dan garis kemiskinan Rp. 457. 899, - per kapita per bulan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya kemudian gencar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya memberdayakan masyarakat dari tingkat kelurahan. Hal tersebut

kemudian diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019 tentang Program Gema Madani Simpati. Melalui perwal tersebut diharapkan program ini dapat membuat masyarakat berdaya, mampu dan mandiri menjalankan peran sosialnya dalam pembangunan.

Program ini menekankan pada adanya partisipasi dari masyarakat dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Tujuannya tentu agar masyarakat dapat benar-benar memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing kelurahan. Hal tersebut penting mengingat program pembangunan di suatu daerah perlu dibuat dengan melakukan proses analisis kebutuhan masyarakat. Analisis kebutuhan masyarakat tersebut kemudian diharapkan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekedar membuat daftar keinginan yang bersifat sesaat (Zamhariri, 2008).

Hal yang juga cukup penting diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam program pembangunan semacam ini menghendaki adanya pendekatan *bottom-up* dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini berarti segala pengambilan keputusan didasarkan pada masukan dan usulan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berperan aktif dari awal sampai akhir pelaksanaan program. Pemerintah

hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan.

Program Gema Madani Simpati ini merupakan salah satu program yang menggunakan pendekatan *bottom-up* karena berbasis partisipasi masyarakat. Saat ini penggunaan pendekatan *bottom-up* dalam pembangunan kian populer, seolah menggeser pendekatan yang sebelumnya lebih banyak digunakan yaitu pendekatan *top-down*. Pendekatan *top-down* dalam proses pembangunan memosisikan masyarakat cenderung hanya sebagai objek atau yang menerima keputusan dari pembuat kebijakan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pembuatan keputusan.

Indonesia sendiri pernah memiliki sebuah program pemberdayaan masyarakat yang cenderung bersifat *top-down* yaitu PNPM Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program dari pusat sehingga daerah terikat dengan aturan yang ada pada Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri. Dalam program PNPM Mandiri, pemerintah pusat juga menunjuk seorang pendamping untuk ditempatkan di daerah yang berpartisipasi dalam program PNPM Mandiri. Pendamping tersebut memiliki tugas memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan.

Program ini kemudian mendapat kritikan terutama dari aspek kegagalan dalam membuat masyarakat menjadi mandiri. Akhirnya PNPM Mandiri akhirnya diubah karena

strategi program tersebut bertolak belakang dengan pengertian pemberdayaan masyarakat.

Dalam perkembangannya, Program Gema Madani Simpati di Kota Tasikmalaya ini pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Pada tahun 2017, Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) dan mendapatkan Penghargaan Inagara Award (Inovasi Administrasi Negara) dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) terkait dengan Program ini. Hal tersebut yang kemudian membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti tentang program ini.

Program Gema Madani Simpati memiliki tiga bidang inovasi kegiatan, yaitu bidang inovasi pembangunan klaster ekonomi masyarakat (I-PAKEM), bidang inovasi penataan infrastruktur lingkungan (I-PASLING), dan bidang inovasi perkembangan potensi sosial-budaya berbudaya berbasis tata nilai lokal (I-PASBUD).

Berdasarkan data capaian masing-masing kegiatan, di Tahun 2019, kegiatan-kegiatan ini belum merata dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Tasikmalaya. Kemudian, misalnya pada program i-PAKEM dimana terbentuknya saung madani di 10 kecamatan sebagai pengendali dan pembina usaha kluster,

ternyata pada saat menilai produk unggulan kelurahan belum ada pedoman atau pun standar yang dijadikan acuan pada saat evaluasi kegiatan. Standar ini menjadi penting karena dapat dijadikan alat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai acuan kegiatan.

Selain itu, proses konsultasi belum dilakukan secara komprehensif karena masih ada peran yang belum dijalankan sesuai fungsinya seperti amanat Peraturan Wali Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019. Dengan demikian, masih ada persoalan terkait dengan pertukaran informasi dan konsultasi dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat.

Kembali pada cara pandang pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, hal tersebut memiliki tantangan terutama terkait tantangan untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam program pembangunan. Tulisan ini kemudian ingin membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam Program Gema Madani Simpati. Upaya pelibatan masyarakat ini kemudian sering dikenal dengan istilah *Community Engagement* di banyak literatur.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Studi mengenai *community engagement* atau pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hal yang menarik mengingat salah satu

unsur penunjang keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Pelibatan masyarakat ini merupakan sebuah proses kerjasama sebagai aksi kolektif yang mengacu pada partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan (Veriasa, 2017).

Wicaksono (2019) berdasarkan penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa keterlibatan komunitas dalam pembangunan membuat keputusan yang dihasilkan lebih bisa diterima. Selain itu, keterlibatan komunitas juga membuat kerja-kerja yang dilakukan jadi lebih bertujuan, terintegrasi, dan sistematis. Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Safrina (2015) dalam penelitiannya terkait Program Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis Masyarakat bahwa pelibatan masyarakat secara langsung memiliki dampak positif karena masyarakat terlibat langsung dalam penentuan langkah-langkah terbaik sehingga dapat berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah yang ada.

Dengan demikian, pendekatan dengan melibatkan masyarakat dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat turut serta mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan kolektifnya.

Kondisi tersebut tentu kembali pada upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya. Selanjutnya, masyarakat dengan

kondisi berdaya memiliki kemampuan untuk mengontrol keadaan atau kondisi yang mempengaruhi kualitas atau situasi kehidupan (Ersing, dalam Christensen & Levinson, 2003). Maka, tujuan dari pembangunan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Terdapat tiga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dalam melakukan pelibatan masyarakat (Veriasa, 2017), yaitu terbentuknya hubungan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, terciptanya *trust* atau kepercayaan dari masyarakat, dan terbangunnya isu bersama disertai aksi kolektif dari masyarakat.

Untuk mencapai ketiga hal tersebut maka ada strategi yang harus dilakukan, diantaranya adalah melakukan pendekatan melalui proses pendampingan untuk membangun hubungan dengan masyarakat sekaligus sebagai upaya memahami problematika yang dialami oleh masyarakat. Keberhasilan upaya ini dapat terlihat dari penerimaan masyarakat.

Selain itu, untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, strategi yang bisa digunakan adalah melalui dibukanya ruang bagi terjadinya pertukaran informasi dan interaksi yang akan mempercepat kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai arah pembangunan yang akan dilakukan. Masyarakat juga didorong untuk dapat memahami bahwa pelibatan masyarakat memang bertujuan untuk membantu mereka

menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Kemudian, sebagai upaya membangun isu bersama dan aksi kolektif dari masyarakat maka perlu untuk mendorong secara lebih luas terjadinya diskusi dan pengembangan berbagai kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesadaran (*awareness*) masyarakat. Ketika kesadaran masyarakat sudah terbentuk dan isu-isu mengenai pembangunan telah disepakati bersama, maka aksi kolektif masyarakat dapat dengan mudah dilakukan. Aksi kolektif ini akhirnya dipandang sebagai sebuah kebutuhan oleh masyarakat guna mencapai perubahan yang diinginkan.

Mencermati ketiga indikator keberhasilan pelibatan masyarakat dan strategi untuk mencapainya, terdapat satu poin penting yang kemudian menjadi salah satu kunci dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan yaitu komunikasi. Hermawan dan Suyono (2016) mengungkapkan bahwa salah satu strategi dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah dengan komunikasi. Hal tersebut juga diperkuat dengan yang dikemukakan oleh Johnston (2018) bahwa pelibatan masyarakat berkaitan dengan bagaimana membangun komunikasi yang interaktif. Selanjutnya Johnston mengemukakan sebuah konsep yang disebut "*Communication Triad*" dalam strategi pelibatan masyarakat yaitu pertukaran informasi, konsultasi, dan

dibukanya ruang partisipasi masyarakat.

Informasi menjadi bagian yang penting dan perlu diperhatikan dalam proses pelibatan masyarakat. Informasi ini tidak hanya diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitator secara satu arah, tetapi pemerintah dalam hal ini juga dapat memperoleh informasi dari masyarakat. Pertukaran informasi ini menjadi sebuah proses untuk memperoleh makna dan arti yang sama tentang permasalahan yang dihadapi. Pelibatan masyarakat yang efektif bergantung pada kualitas dan relevansi informasi yang ada (Johnston, 2010).

Selanjutnya, pemberian konsultasi juga menjadi salah satu hal yang penting dalam komunikasi terkait pelibatan masyarakat. Konsultasi yang diberikan kepada masyarakat merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan pendapat dan pandangan dari masyarakat terkait dengan masalah tertentu (Johnston, 2010). Pada pengertian ini konsultasi memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan dan membantu pemecahan masalah tersebut.

Kemudian, aspek lainnya yang penting dalam pelibatan masyarakat adalah dibukanya ruang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk turut serta mencari solusi terhadap permasalahan sosial yang ada. Dalam hal ini, partisipasi juga berarti kepemilikan *power* oleh masyarakat untuk mempengaruhi

keputusan akhir yang dijalankan (Johnston, 2018). Dibukanya ruang partisipasi masyarakat ini berarti masyarakat benar-benar terlibat, termasuk dalam proses pembuatan dan penentuan keputusan. Dibukanya ruang bagi partisipasi masyarakat ini mengandung nilai penting dalam pelibatan masyarakat. Suparjan dan Suyatno (2003) menyatakan salah satu manfaat dari adanya keterlibatan masyarakat adalah adanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan. Lebih jauh lagi, adanya partisipasi juga mendukung upaya aktualisasi potensi dan pertumbuhan masyarakat (Muslim, 2007).

Dengan demikian, penggunaan konsep "*Communication Triad*" sebagai strategi pelibatan masyarakat menurut Johnston ini dianggap cukup relevan dan dapat membantu menjelaskan strategi pelibatan masyarakat dalam program pembangunan partisipatif di Kota Tasikmalaya ini. Maka dari itu, uraian pada bagian pembahasan akan secara lebih detail menjelaskan tentang strategi pelibatan masyarakat yaitu pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang partisipasi masyarakat.

Upaya pelibatan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif memang tidak mudah. Ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah sendiri hanya akan membuat program berbasis partisipasi

masyarakat menjadi tidak efektif dan sulit mencapai tujuannya. Kedepan studi mengenai pelibatan masyarakat kemudian perlu terus dikembangkan terutama berkaitan dengan upaya-upaya mengefektifkan pelibatan masyarakat tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya memahami tentang strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati di Kota Tasikmalaya.

Untuk mendukung penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yang berasal dari Tim Fasilitasi Program. Selain itu, informan berasal dari tim pelaksana kegiatan yang berada di kelurahan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada teknik purposive dimana informan dipilih berdasarkan atas kepemilikan informasi yang berguna untuk penelitian.

Selain itu, Data lain juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dijadikan sumber referensi pendukung. Observasi dilakukan untuk menunjang kelengkapan data dengan mengunjungi langsung kelurahan tempat pelaksanaan Program Gema Madani Simpati di Kota Tasikmalaya. Melalui kegiatan ini, dilakukan juga wawancara kepada masyarakat terkait program tersebut. Penggunaan triangulasi sumber data dan metode

menjadi cara peneliti untuk memastikan kebenaran atau keabsahan data.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendorong partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan melalui Program Gema Madani Simpati. Hal tersebut kemudian dapat menjadi bahan menyusun rekomendasi untuk perbaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019 tentang Program Gema Madani Simpati, program ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mempromosikan unsur gotong-royong. Nilai-nilai gotong-royong ini diharapkan akan membantu menurunkan angka masyarakat yang tidak mampu di Kota Tasikmalaya.

Program Gema Madani terfokus pada kegiatan bidang pengembangan ekonomi (I-PAKEM atau Inovasi Pengembangan Klaster Ekonomi Masyarakat), kegiatan bidang pembangunan infrastruktur (I-PASLING atau Inovasi Penataan Infrastruktur Lingkungan), serta kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan (I-PASBUD atau

Inovasi Pengembangan Potensi Sosial-Budaya Berbasis Tata Nilai Lokal). Ketiga bidang tersebut merupakan bidang yang dikembangkan agar dapat menciptakan masyarakat yang berdaya sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Dari penamaan program pemberdayaan masyarakat Kota Tasikmalaya ini nampak jelas bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya fokus terhadap pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga budaya dan nilai-nilai sosial. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini antara lain adalah pemerintah di tingkat kota dan kelurahan, tim fasilitator, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Program Gema Madani Simpati ini memiliki berbagai kegiatan. Kegiatan bidang I-PAKEM diarahkan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil pada skala kecamatan guna memperkuat sektor industri rumahan. Berdasarkan data Diskominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya, capaian kegiatan pada Tahun 2019 yaitu terbentuknya saung madani di 10 kecamatan, terbentuknya 78 kelompok usaha klaster di 69 kelurahan dengan jumlah anggota 566 orang. Selain itu, capaian dibidang ini adalah terlaksananya pelatihan administrasi keuangan kelompok dan penajaman teknis usaha klaster di 69 kelurahan, terlaksananya sosialisasi legalitas usaha, dan training strategi pemasaran di 69 kelurahan.

Kemudian, kegiatan bidang I-PASLING dilakukan melalui usaha penataan, pembangunan, pemeliharaan, dan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Adapun capaian pada tahun 2019 (data Diskominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya) yaitu terbangunnya rabat beton jalan atau gang lingkungan dengan volume 4.856 M3, labur aspal jalan atau gang lingkungan dengan volume 2.432 M2, hotmix manual jalan atau gang lingkungan dengan volume 2.051 M2, paving blok jalan atau gang lingkungan dengan volume 187 M2, dan drainase lingkungan dengan volume 420 m3.

Lalu, untuk kegiatan bidang I-PASBUD dilakukan melalui penciptaan masyarakat atau komunitas madani. Capaian pada tahun 2019 (data Diskominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah terbentuknya lembur madani berbasis sistem informasi manajemen pelayanan terpadu berbasis data dan website di 10 kelurahan pada 10 kecamatan.

### **Pertukaran Informasi sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat**

Melalui program Gema Madani Simpati, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahapan perencanaan pembangunan. Masyarakat terlibat pada pertemuan dengan fasilitator bersama para tokoh masyarakat untuk membahas rencana kegiatan dan pengembangan potensi kelurahan. Hal tersebut dilakukan melalui penggalan

informasi dari masyarakat dan *sharing* informasi dari para pemangku kepentingan lain. Harapannya melalui kegiatan ini akan dapat memetakan masalah dan potensi yang ada di kelurahan sehingga dapat menentukan langkah-langkah kedepan sebagai sesuatu yang akan diupayakan bersama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang terbaik untuk mereka (Sururi, 2017).

Keterlibatan ini diikuti dari mulai ketua RT, ketua RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), TPPKK, Karang Taruna dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan ini berjalan dengan aktif karena masyarakat memiliki pandangan bahwa partisipasi itu tidak hanya bisa diberikan dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berupa ide, pemikiran, dan tenaga yang dapat mereka berikan untuk kepentingan bersama.

Adanya semangat kekeluargaan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan Program Gema Madani di Kota Tasikmalaya. Karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat yang agamis dimana salah satu prinsip yang dipegang adalah menjaga silaturahmi. Dalam proses ini, prinsip tersebut mendukung kelancaran pertukaran informasi dan dialog yang dilakukan oleh tim fasilitator dan masyarakat. Misalnya pada proses perencanaan kegiatan, masyarakat memiliki

antusias serta semangat yang tinggi untuk selalu berdialog mengenai pengembangan potensi kelurahan. Ketika masyarakat memiliki ide-ide baru terkait pengembangan potensi kelurahan, hal tersebut secara intensif disampaikan kepada tim fasilitator.

Kemudian, untuk kelancaran pelaksanaan program, mengetahui informasi tentang tata cara pengelolaan program juga merupakan hal yang penting. Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya menyebarkan informasi dan memberikan sosialisasi terkait program sesuai dengan tujuan yang telah di atur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pengelolaan program. Terkait hal ini, fasilitator program mewakili pihak pemerintah dalam menyampaikan informasi yang lebih mendalam tentang program Gema Madani Simpati.

Hal yang perlu digaris bawahi dari adanya proses pertukaran informasi ini yaitu pentingnya menghasilkan kesamaan pandangan yang kemudian menjadi alat pemersatu gerak berbagai unsur yang terlibat untuk mencapai tujuan. Namun, hal yang menjadi tantangan kemudian adalah bagaimana fasilitator sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah ini kemudian dapat mengelola informasi dan memfasilitasi pertarungan ide dan gagasan masyarakat terkait kegiatan yang akan dilakukan pada program ini.

### **Pemberian Konsultasi pada Masyarakat**

Keberhasilan pelibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja. Peran pemerintah dibutuhkan terutama pada saat masyarakat mencoba memastikan bahwa ide-ide yang dimiliki telah sesuai dengan tujuan besar wilayah dan sesuai secara tertib administrasi. Untuk mendukung hal ini dilakukan berbagai proses konsultasi baik oleh masyarakat bersama para tokoh masyarakat, maupun masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menjadi penting karena dalam pelibatan masyarakat dalam pembangunan memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya.

Program Gema Madani Simpati didukung oleh beberapa peran yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai, yaitu tim pengelola program dan tim verifikasi. Tim pengelola program merupakan kelompok tim yang dibentuk walikota untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Program Gema Madani secara berjenjang. Sedangkan tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi kelayakan kegiatan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 140/Kep. - Kesra/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Gema Madani Simpati, tim pengelola program ini terdiri dari Pembina (Walikota), Ketua (Sekretaris Daerah), Ketua Harian (Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra – Sekretaris Daerah), Sekretaris (Bagian Kesra – Sekretaris Daerah), Bidang-bidang yang terdiri dari 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan; 4) Dinas Sosial. Selain itu, ada juga Fasilitator yang terdiri dari koordinator dan asisten koordinator yang dipilih melalui proses seleksi.

Struktur pengelola diperlukan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program baik sebelum proses pengajuan maupun setelah program dilaksanakan. Teknis konsultasi dilakukan oleh bidang-bidang yang terdiri dari perwakilan SKPD terkait kegiatan bidang I-PAKEM, I-PASLING, dan I-PASBUD. Walaupun pada kenyataannya, berdasarkan wawancara pada informan bahwa keterlibatan tim pengelola program dari SKPD ini belum begitu optimal terkait monitoring dan mendorong penguatan kapasitas pelaksanaan program. Hal tersebut dikarenakan keterlibatannya tidak begitu mendalam pada hal-hal yang sifatnya substantif, sehingga peran tersebut lebih banyak dijalankan oleh fasilitator.

Selanjutnya fasilitator yang merupakan tenaga pendamping memiliki tugas untuk memfasilitasi, mendampingi, dan memperkuat

kegiatan Gema Madani Simpati. Selain itu Fasilitator juga mempunyai fungsi melakukan bimbingan, motivasi, pengarahan, dan bantuan pembelajaran bagi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan. Untuk menjaring fasilitator dilakukan proses seleksi dan/atau penetapan calon fasilitator dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan walikota.

Fasilitator juga terbagi kedalam beberapa peran yaitu Koordinator tingkat kota; Asisten koordinator bidang I-PAKEM, I-PASLING, dan I-PASBUD; Asisten administrasi; dan Fasilitator tingkat kelurahan. Dari susunan fasilitator yang sudah ditentukan terlihat bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya sudah berupaya merencanakan peran-peran pendukung dalam keberhasilan program Gema Madani.

Dengan demikian, keberhasilan pelibatan masyarakat dalam program ini turut didorong oleh adanya tim pengelola program yang melakukan pembinaan, pendampingan, dan konsultasi secara aktif. Semangat partisipasi yang tinggi dari masyarakat disambut baik dengan komitmen dari tim pengelola kegiatan menjadikan setiap kendala yang dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan bersama-sama.

## **Membuka Ruang Partisipasi Aktif Masyarakat**

Salah satu strategi untuk menyukseskan upaya melibatkan masyarakat Kota Tasikmalaya pada Program Gema Madani Simpati ini adalah dengan memberikan ruang partisipasi aktif untuk masyarakat. Upaya menyediakan ruang partisipasi aktif disini tidak hanya memberikan kesempatan yang sifatnya semu, namun juga memastikan bahwa hasil dari partisipasinya tersebut benar-benar membuahkan sesuatu yang akan berdampak pada diri mereka sendiri.

Pada dasarnya, masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup familiar dengan berbagai program pemerintah yang mengharuskan adanya partisipasi dari masyarakat. Dimulai dari tahun 2010, masyarakat Kota Tasikmalaya sudah mulai diperkenalkan dengan PNPM Mandiri yang digagas oleh pemerintah pusat. Program tersebut kemudian berubah seiring dengan perubahan dari visi dan misi walikota menjadi P2KK yang kemudian dikenal dengan istilah program pemberdayaan kelurahan. Program ini masih mengusung konsep melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Setelah itu, P2KK berubah kembali menjadi program Gema Madani yang ingin mendorong masyarakat agar dapat mandiri. Kemudian, pada tahun 2018 program tersebut berubah menjadi program Gema Madani Simpati dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, namun lebih mendorong lagi partisipasi masyarakat dalam

pembangunan yang nantinya diharapkan akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, seiring dengan adanya bukti nyata manfaat dari program pembangunan ini, masyarakat juga semakin terdorong untuk terlibat dalam prosesnya walaupun pada kenyataannya masih ditemukan tantangan terkait menyatukan berbagai sudut pandang sampai mencapai mufakat.

Proses untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat pada program ini dilakukan melalui proses pendekatan dan perubahan mindset yang dilakukan oleh tim pengelola program dan fasilitator sampai tingkat kelurahan. Masyarakat didorong untuk peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka sehingga tercipta kesadaran bahwa program ini adalah sebuah momentum untuk perubahan. Selain itu, masyarakat juga disadarkan bahwa perubahan tersebut secara nyata ada ditangan mereka sendiri sehingga mereka harus terlibat secara aktif melalui program ini.

Seperti yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa program ini mengusung tiga program pokok yaitu terkait ekonomi, infrastruktur lingkungan, dan sosial budaya. Masing-masing program pokok itu kemudian dikembangkan lagi kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan melalui berbagai forum. Kegiatan-kegiatan yang telah

melalui proses diskusi bersama kemudian diusulkan dengan membuat proposal yang didampingi oleh fasilitator. Dari proses tersebut dapat terlihat bahwa memang masyarakat sendiri yang memilih dan menentukan kebutuhan prioritas apa yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan mereka.

Pada tingkat kelurahan, terdapat struktur pelaksana kegiatan yang kemudian disebut tim pelaksana kegiatan kelurahan. Tim ini yang mendampingi dan memfasilitasi proses diskusi sampai pada pembuatan proposal tersebut. Kemudian pada tahap yang lebih operasional di lapangan, masyarakat akan dibantu oleh panitia pelaksana lapangan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan. Panitia ini pun merupakan orang-orang terpilih dibidangnya melalui seleksi dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan program ini, masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tetapi didampingi dan difasilitasi bahkan sampai pelaksanaan operasional kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan bisa terarah dan dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

Sebagai wujud partisipasi dalam untuk teknis pelaksanaan di lapangan, pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan kesempatan bagi perwakilan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Gema Madani khususnya pada kegiatan teknis di lapangan. Perwakilan masyarakat ini

disebut dengan PPL yang merupakan relawan yang dipilih dari dan oleh masyarakat pada tingkat RT/RW atau berdasarkan lokasi kegiatan.

Seorang PPL selain berpegang teguh pada prinsip partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. PPL yang terpilih adalah perwakilan masyarakat yang beresentuhan langsung dengan usulan kegiatan Gema Madani di level RT/RW. Keterlibatan PPL dalam keberhasilan Gema Madani dinilai sangat penting karena tidak hanya melaksanakan kegiatan tetapi juga turut bertanggung jawab dalam hal pelaporan administratif dari mulai pencairan dana melalui proses akad perjanjian antara Ketua TPK selaku penanggung jawab kegiatan dan PPL selaku pelaksana kegiatan, sampai kepada pelaporan.

Seiring dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terjadi perubahan mindset dari masyarakat untuk ikut serta menentukan dan melaksanakan proses pembangunan. Antusias masyarakat ini bahkan sering kali tidak diimbangi oleh jumlah anggaran yang memadai sehingga kegiatan yang dipilih kemudian tidak bisa seluruhnya dilakukan ditahun tersebut namun direncanakan untuk tahun berikutnya. Fenomena lain yang bisa terlihat sebagai bukti adanya antusias dari masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan adalah adanya berbagai bantuan dari masyarakat, baik berupa uang maupun tenaga untuk mendukung operasional kegiatan.

Misalnya, ada pengerjaan jalan gang di kelurahan, maka unsur masyarakat juga bisa ikut menyumbang tenaga, makanan, dan lain-lain.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan semacam ini menjadi sebuah proses pendewasaan bagi masyarakat karena masyarakat didorong untuk berfikir dan menciptakan ide yang tentu ide-ide tersebut harus tetap selaras dengan visi dan misi yang ada pada RPJMD Kota Tasikmalaya. Walaupun ide dan pelaksana kegiatannya adalah masyarakat sendiri, namun tetap ada upaya untuk mendorong hasil yang optimal dalam proses pembangunan melalui evaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian menghasilkan informasi untuk pemberian reward bagi kelurahan yang menjalankan program tersebut dengan baik.

Demikian telah diuraikan beberapa hal yang menjadi strategi pelibatan masyarakat dalam menunjang keberhasilan program Gema Madani Simpati di Kota Yogyakarta. Adanya proses yang dilakukan masyarakat dengan pemerintah dalam program ini menunjukkan bahwa masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini sebenarnya sesuai dengan hakikat pembedayaan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan dan partisipasi adalah strategi dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya dimana proses inipada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan

yang berpusat pada rakyat (Hikmat, 2006).

## **KESIMPULAN**

Program Gema Madani Simpati di Kota Tasikmalaya menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Tasikmalaya. Keberhasilan program ini kemudian perlu didukung oleh berbagai kekuatan yaitu, kekuatan regulasi, kekuatan kelembagaan, kekuatan peran aparatur, dan kekuatan peran masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Upaya melibatkan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati di Kota Tasikmalaya dilakukan melalui proses komunikasi melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang partisipasi aktif masyarakat.

Proses komunikasi pemberdayaan yang dilakukan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam Program Gema Madani Simpati. Informasi diberikan secara terbuka dari pemerintah selaku Tim Pengelola Program dari mulai sasaran, kebijakan dan anggaran. Kemudian Konsultasi diberikan oleh Tim Fasilitator dengan komitmen penuh yang tujuannya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memastikan berbagai macam ide yang dimiliki masyarakat telah sesuai dengan tujuan besar kegiatan pemberdayaan dan sesuai secara tertib administratif. Serta partisipasi aktif dan respon positif dari masyarakat menjadi kunci bahwa

kolaborasi dalam program Gema Madani Simpati ini berjalan dengan baik. Dimana telah terdapat proses timbal balik antara pemerintah, tim fasilitator dan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang mengarah kepada peningkatan semangat partisipasi masyarakat.

*Partisipasi Tahun 2019.* Diakses melalui: <https://portal.tasikmalayakota.go.id/2019/03/14/sosialisasi-gema-madanisimpati-gerakan-masyarakat-mandiri-berdayasaing-dan-inovatif-sebagai-model-pembangunan-berbasis-partisipasi-tahun-2019/>

#### DAFTAR PUSTAKA

Akbar, F., dkk (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo.* Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 6, Nomor 2, 2018, Halaman 135-142.

Christensen, K.S. dan Levinson, D. (2003). *Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World 1st Edition.* Sage Publication.

Hermawan, Y dan Suryono, Y. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program-program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran.* Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, Hal 97 – 108.

Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora.

IKPS Diskominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2019). *Sosialisasi Gema Madani Simpati sebagai Model Pembangunan Berbasis*

Johnston, K.A., Lane, A.B., Hurst, B. & Beatson, A. (2018). *Episodic and Relational Community Engagement: Implication for Social Impact and Social License.* The Handbook of Communication Engagement, pg. 169-185.

Kemenkeu RI. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan.* Diakses melalui: [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pbb\\_p2.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf).

Muslim, A. (2007). *Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Apliedia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. Vol. VIII, No. 2 Desember 2007, Hal 89-103.

Safrina. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh.* Jurnal hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1, 2015, Hal 30-49.

Sururi, A. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam*

- Kabupaten Lebak. Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan - April, halaman 1-25.
- Suparjan dan Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyanto, B. (2001). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Volume XIV, Nomor 4, Oktober 2001, Halaman 25-42.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kemandirian Kelurahan (P2KK) di Kota Tasikmalaya.
- Veriasa, T. O. (2017). *Pelibatan komunitas (Community Engagement): Antara pengembangan komunitas, pemberdayaan dan partisipasi*. Diakses melalui: [https://www.researchgate.net/publication/321753833\\_Pelibatan\\_Komunitas\\_Community\\_Engagement\\_in\\_Book\\_Antara\\_Pengembangan\\_Komunitas\\_Pemberdayaan\\_dan\\_Partisipasi](https://www.researchgate.net/publication/321753833_Pelibatan_Komunitas_Community_Engagement_in_Book_Antara_Pengembangan_Komunitas_Pemberdayaan_dan_Partisipasi).
- Wicaksono, K, W. (2019). *Keterlibatan Komunitas (Community Engagement) dalam Pembangunan di Tingkat Desa*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol 3 No 1, 2019.
- Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi kelembagaan: Paradigma, teori dan kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Zamhariri. (2008). *Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 4, Nomor 1, Juni 2008.